

LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI

| | |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Tahun Sidang | : 2015-2016 |
| Masa Persidangan | : III |
| Rapat Ke | : 38 |
| Jenis Rapat | : Rapat Dengar Pendapat Umum |
| Dengan | : Bidan PTT |
| Sifat Rapat | : Terbuka |
| Hari, Tanggal | : Rabu, 16 Maret 2016 |
| Waktu | : Pukul 11.00 WIB s.d Selesai |
| Tempat | : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III) |
| Acara | : Audiensi/ Konsultasi terkait tenaga Honoror |
| Ketua Rapat | : Arif Wibowo/Anggota Komisi II DPR RI |
| Sekretaris Rapat | : Drs. Nasrulloh, M.A.P/Kabagset Komisi II DPR RI |
| Hadir | : 3 Anggota Komisi II DPR RI |
| | 1. Arif Wibowo/F-PDIP |
| | 2. Rahmat Nasution Hamkah/F-PDIP |
| | 3. Dr. Ir Hetifah, M.PP/F-PG |

I. PENDAHULUAN

- A. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Bidan PTT pada hari Rabu, 16 Maret 2016 dibuka pada pukul 12.15 WIB yang dipimpin oleh Anggota Komisi II DPR RI, Arif Wibowo dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- B. Ketua Rapat menyampaikan agenda RDPU dengan Bidan PTT terkait dengan Konsultasi terkait tenaga Honoror.
- C. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Bidan PTT untuk memberikan penjelasan terkait kedatangannya ke Komisi II DPR RI.

II. CATATAN

- A. Perwakilan Bidan PTT menyampaikan Kekhawatiran bahwa bidan PTT tidak dapat diangkat menjadi PNS dengan perkembangan yang terjadi hingga saat ini.
- B. Perwakilan Bidan PTT meminta dukungan komisi II agar dibuatkan payung hukum untuk mengangkat bidan PTT segera, terutama untuk bidan PTT dengan usia di atas 35 tahun. Bidan PTT yang berusia di atas 35 tahun menolak keberadaan PPK yang ada di dalam UU ASN

- C. Perwakilan Bidan PTT meminta dukungan Komisi II agar bisa mengadvokasi KemenPAN RB dan pihak-pihak lain yang terkait untuk melakukan revisi UU terutama soal batas usia CPNS dengan mempertimbangkan masa bakti yang telah ditempuh bidan PTT selama ini.
- D. Perwakilan Bidan PTT menyampaikan pakta integritas terkait kesanggupan mereka melaksanakan pengabdian jika diangkat menjadi PNS.
- E. Perwakilan Bidan PTT meminta perhatian Komisi II DPR RI di baleg terkait RUU Kebidanan
- F. Komisi II DPR RI menyampaikan kesimpulan Rapat pada tanggal 22 Februari 2016 dengan Menpan RB, Kemenkumham, Kemenkeu, BKN, terkait masalah Tenaga Honorar.
- G. Komisi II akan mengusulkan revisi terbatas UU ASN untuk mengakomodir keberadaan bidan PTT.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.10 WIB.

Jakarta, 16 Maret 2016
Anggota Komisi II DPR RI

ttd
Arif Wibowo
A-193